

SKRIPSI

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMASARAN LOBSTER YANG TIDAK
MEMILIKI SURAT IZIN USAHA PERIKANAN.**

(Studi Perkara Nomor: 202/ Pid.Sus-PRK/2018/PN Byw.)

*Diajukan sebagai syarat untuk
Memperoleh gelar sarjana hukum*



OLEH:

**ZAIFI SURYA GEMILANG
1410012111103**

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2019**

No.Reg : 40/PID-02/II-2019

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

LEMBAR PERSETUJUAN

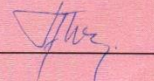
No. Reg : 40/PID-02/II-2019

Nama : Zaifi Surya Gemilang
NPM : 1410012111103
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pemasaran Lobster Yang Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan. (Studi Perkara Nomor: 202/Pid.Sus-PRK/2018/PN Byw.)

Telah disetujui untuk diuji pada Hari Senin Tanggal **Delapan Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas** untuk dipertahankan dihadapan penguji

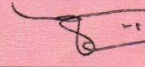
1. Syafridatati, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



2. Yetisma Saini, S.H., M.H.

(Pembimbing II)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

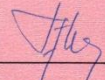


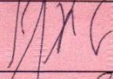
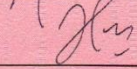
PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 40/PID-02/II-2019

Nama : Zaifi Surya Gemilang
NPM : 1410012111103
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pemasaran Lobster Yang Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan. (Studi Perkara Nomor: 202/Pid.Sus-PRK/2018/PN Byw.)

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Pidana pada Hari **Senin** Tanggal **Delapan Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|---|--------------|---|
| 1. Syafridatati, S.H., M.H. | (Ketua) |  |
| 2. Yetisma Saini, S.H., M.H. | (Sekretaris) |  |
| 3. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. | (Anggota) |  |
| 4. Rianda Seprasia, S.H., M.H. | (Anggota) |  |
| 5. Hendriko Arizal, S.H., M.H. | (Anggota) |  |

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**


(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pemasaran Lobster Yang Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan.

(Studi Perkara Nomor: 202/ Pid.Sus-PRK/2018/PN Byw.)

Zaifi Surya Gemilang¹, Syafridatati¹, Yetisma Saini²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email :suryagemilang357@gmail.com

ABSTRAK

Lobster merupakan salah satu potensi sumber daya hayati yang terdapat di Indonesia. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki "SIUP". Bagi yang tidak memiliki SIUP, maka akan dipidana dengan Pasal 92 Undang-undang tentang perikanan, seperti kasus yang terjadi di kabupaten Banyuwangi. Pada perkara Nomor: 202/Pid.Sus-PRK/2018/PN Byw, bahwa terdakwa terbukti memasarkan lobster tanpa surat izin usaha perikanan dan dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas hari) dan denda Rp.2.000.000.00,- (dua juta rupiah). Rumusan masalah ini adalah: 1) Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku pemasaran lobster yang tidak memiliki surat izin usaha perikanan? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pemasaran lobster yang tidak memiliki surat izin usaha perikanan? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah melalui studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan: 1) Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pemasaran lobster yang tidak memiliki surat izin usaha perikanan, bahwa terdakwa telah melanggar pasal 92 Undang-undang Perikanan dan dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas hari) dan denda Rp.2.000.000.00,- (dua juta rupiah) . 2) Pertimbangan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum kepada terdakwa untuk menjatuhkan sanksi pidana yaitu dengan memperhatikan aspek yuridis dan aspek non yuridis.

Kata Kunci: Penerapan, Pidana, Pemasaran, Lobster

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul “Penerapan pidana terhadap pelaku pemasaran lobster yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan Perkara Nomor: 202/ Pid.Sus-PRK/2018/PN Byw.)”. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta. Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari ibu Syafridatati, S.H., M.H, selaku Pembimbing I dan ibu Yetisma Saini, S.H., M.H, selaku Pembimbing II dan sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana, kemudian ucapan terimakasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Bapak Zarfina S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Dosen-dosen yang mengajar dan memberikan ilmu kepada saya selama saya berkuliah di Universitas Bung Hatta.
4. Karyawan-karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
5. Teristimewa untuk Ayahanda Zainul dan Almarhumah Ibunda Fisda Hasan serta abang Zaifi Yoga Pratama, yang dengan do`a dan kasih sayangnya serta dorongan baik materil maupun formil yang tulus dan ikhlas.

6. IbuElyana NoviraM.H. sebagai Pembimbing Akademik.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, 6 Januari 2019

Wassalam
Penulis

ZAIFI SURYA GEMILANG
1410012111103

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii

DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan penelitian	6
D. Metode penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang pidana dan pemidanaan.....	9
1. Pengertian pidana dan pemidanaan	9
2. Teori pemidanaan.....	10
B. Tinjauan tentang lobster sebagai sumber perikanan	12
1. Pengertian lobster.....	12
2. Jenis-jenis lobster	13
3. Habitat lobster	14
4. Syarat pemasaran lobster.....	16
C. Tinjauan tentang Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).....	17
1. Pengertian Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).....	17
2. Persyaratan pembuatan SIUP	18
3. Usaha perikanan yang harus ada SIUP.	19
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan pidana terhadap pelaku pemasaran lobster yang tidak me-	
miliki Surat Izin Perikanan (SIUP) dalam perkara nomor 202/Pid.Sus	

-PRK/2018/PN Byw 20

B. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor:202/Pid.Sus-PRK/2018/

PN Byw 37

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan 49

B. Saran 51

DAFTAR PUSTAKA